

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 65 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Proyek INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan guna mencapai hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta dapat dipertanggung jawabkan, perlu menunjuk Pemimpin dan bendaharawan proyek.
b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana pada huruf a. Konsideran MENIMBANG ini, dipandang perlu menunjuk Pemimpin dan Bendaharawan Proyek INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1993/1994 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 dan nomor 30 tahun 1984;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 Th. 1984;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993, Nomor : 050.1/441/SJ.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 No. 050/3250/021/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

- 2 -

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pemimpin dan bendaharawan proyek untuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Indische Comptabiliteit Wet (ICW) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini Pemimpin dan Bendaharawan proyek bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan laporan secara periodik atas kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan proyek kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 2 Maret 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMAD FARIED, SH

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Lamongan;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Dati II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk. II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bag. Keuangan Setwilda Tk. II Lamongan;
9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Lamongan;
10. Sdr. Kepala Cab. DPU Bina Marga Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan;
11. Sdr. Kepala Cab. DPU Pengairan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan;
12. Sdr. Kepala Cab. DPU Dipta Karya Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan;
13. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ASISTEN SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETWILDA
S U H E R M A N, SH
Penata Muda Tk. I
NIP. 010204393

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 65 TAHUN 1993
TANGGAL : 2 Maret 1993

NAMA PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN
DAERAH TINGKAT II TAHUN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

N A M A			
NO.	1	2	3
	PEMIMPIN PROYEK	BENDAHARAWAN	NAMA PROYEK
1.	Drs. A. JACHJA	S U J A R W O	Biaya Perencanaan Umum, Perencanaan Tehnis dan Pengendalian Tehnis
2.	Drs. MARSOEDI	ABDUL AZIS	Biaya Administrasi dan Pengendalian Pelaksanaan proyek.
3.	FADELI, SH	KOESNADI	Biaya Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan proyek.
4.	Dra. ANY KISWATI	PURWATI	Biaya Pengawasan Fungsional.
5.	S U D A R T O	SOETARDJO	1. Rehabilitasi Pasar Lamongan utara. 2. Perluasan Pasar Ikan. 3. Perluasan Pasar Lamong Raya. 4. Pembangunan poliklinik spesialis dan peralatan medis di RSUD dr. Sugiri. 5. Pembangunan Pasar Sidoharjo.
6.	Ir. IMAM AGUS SALIM	SOETARDJO	1. Peningkatan landasan Terminal Lamongan. 2. Peningkatan landasan Terminal Babat. 3. Pemb. landasan Parkir di Desa Ngimbang. 4. Pembangunan Jembatan Karanggeneng. 5. Penggantian Jembatan Mojo. 6. Penggantian Jembatan Dinoyo. 7. Peningkatan Jalan Sukorame - Sembung. 8. Peningkatan Jalan Dukuh - Lemahbang. 9. Peningkatan jalan Made - Plosowahyu. 10. Peningkatan jalan Kalen - Kedungpring. 11. Pemb. jalan Makadam Dibee - Kiringan. 12. Pemb. Sarana dan prasarana obyek wisata di Paciran. 13. Perbaikan jalan menuju TPA di Desa Tambakrigadung. 14. Pemplh. berkala Jalan Ngimbang Bluluk. 15. Pemplh. berkala Jalan Sukobendu - Kd. pring. 16. Pemplh. berkala Jalan Pule - Dukuh.

1 :	2 :	3 :	4 :
			17. Pemplh. berkala jalan Sumberwudi - Tunjungmekar.
			18. Pemplh. rutin jalan dan saluran dalam Kota Lamongan.
			19. Pemplh. rutin jalan dan saluran dalam Kota Babat.
			20. Pemplh. rutin jalan wilayah Lamongan utara.
			21. Pemplh. rutin jalan wilayah Lamongan tengah.
			22. Pemplh. rutin jalan wilayah Lamongan selatan.
			23. Pemplh. rutin jembatan Kabupaten.
			24. Pemb. prasarana pedesaan Sendang - Payaman - Godog.
			25. Pemb. dinding penahan tanah di jalan Kb.bahu Puter - Kalipang
			26. Pemb. dinding penahan tanah di jalan jurusan Blimbing.
			27. Pemb. dinding penahan tanah di jalan Lamongan - Sugio.
			28. Rehabilitasi saluran dan rumah pompa di Kel. Sidokumpul.
			29. Rehabilitasi saluran dan trotoar jln. P. Sudirman.
			30. Rehabilitasi bendung Sumberbendo.
			31. Pemb. plengsengan di jalan Pucuk - Sekaran.
✓ 7.	R. HARI PURWANTO, SH	LISWIJAYATI S. ✓	Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara.
8.	Ir. PUDYARTONO	Ir. TJAHJO PRAJITNO	Pengembangan Tanaman Produktif dan Tanaman Penghijauan (Pengembangan Tanaman Sengon tumpangsari Kelapa).
9.	Drs. ES. SOEPRAPTO	W A R J I, NS	Pengembangan Tanaman Produktif dan Tanaman Penghijauan (Pengembangan Tanaman Mangga).
10.	SOENADJI, BA	W A R J I, NS	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).
11.	ISMUNARTO	LANGGENG SAU'UD ASLUR, BE	Rencana Umum Tata Ruang Kota.
12.	Drs. F. BASUKI	S U J A R W O	Penyusunan Buku Pola Dasar & Replita VI.
13.	KASROEN	MULYONO	Revisi Data Pokok Pembangunan Dati. II Lamongan.
14.	ACHMAD CHOZIN	S U W O J O	Pendataan Objek dan Subjek PBB.
15.	KASROEPIN	M. TOHA	Pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
16.	Drs. ABDURRACHMAN HADI	SULIKAH	Pemb. Prasarana Pedesaan (Ronggo-hadi).

1	:	2	:	3	:	4
17.		Drs. BRUNO BU'U DEWI		SUPARMAN		Pemb. sarana pembibitan bandeng.
18.		Dra. LULUK SUPRPTI		MUSTOFA MUKTAR		Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT).
19.		ALFAN JAUHARI, BA		Drs. IG NGURAH WAR NAYA		Pelaksanaan rintisan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Salinan sesuai dengan aslinya :
AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ASISTEN I SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
U.B.
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
- ttd
R. MOHAMAD FARIED, SH

S U H E R M A N, SH
Penata Muda Tk.I
NIP. 010204393